



## Sanepa (Protes) Sultan Soal Keistimewaan



Oleh: Herry Zudianto

SAYA mengenal Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam kedudukan atau perspektif selaku gubernur sekaligus raja sudah kurang lebih 7 tahun ini. Dari versi saya, beliau adalah seorang yang demokratis, seorang yang sangat menghargai aspirasi, seorang yang sangat tidak mau memaksakan kehendak.

Tetapi, dari perspektif sebagai raja Jawa, di dalam mengaktualisasikan sikap-sikap demokratis seperti disebut di atas, cara dan kalimat yang

digunakan Sultan tidaklah sama, tidak sevilgar atau seharafiah cara dan kalimat yang biasa digunakan dalam komunikasi politik pada umumnya.

Sehingga saya melihat banyak pihak atau komponen kadang-kadang menjadi naif dalam menangkap pemikiran Sultan, karena hanya menangkap apa yang beliau katakan, bukan menggali lebih dalam latar belakang beliau mengatakan sesuatu atau membuat statement tentang

sesuatu. Inilah yang dalam budaya Jawa dikenal sebagai sanepa. Konsep sanepa sama sekali tidak boleh dikesampingkan ketika berkomunikasi dengan Sultan. Jika tidak, maka kita pasti atau bisa keliru dalam mengartikannya.

Mengenai pernyataan Sultan yang mengatakan pemerintah pusat tidak adil (soal RUU Keistimewaan), bukanlah bentuk pemaksaan kehendak atau kemauan beliau untuk menjabat sebagai gubernur selamanya. Sultan yang demokratis menyadari sekali, secara etika kenegaraan, kedudukan DIY sebagai bagian dari

NKRI membawa konsekuensi DIY harus menyesuaikan diri dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada dinamika ketatanegaraan di Indonesia.

Sanepa yang semestinya bisa kita baca dari pernyataan Sultan adalah beliau kecewa dengan proses pembahasan keistimewaan Yogyakarta. Pemerintah pusat seharusnya menunjukkan penghargaan yang tinggi atas peran sejarah Hamengku Buwono IX yang tanpa pamrih menyatakan Kasultanan Yogyakarta berga-

>> KE HAL 4

1. Walikota Yogyakarta

Dihaturkan Kepada Yth. :

### Sanepa (Protes) Sultan Soal Keistimewaan

Sambungan dari hal. 1

bung dengan NKRI, sebagaimana ditegaskan melalui maklumat 5 September 1945.

Tetapi, kenyataannya, dalam proses RUK ini terlihat sekali pemerintah pusat "setengah meneyepelekan", karena proses pembahasan RUK yang dimulai pada tahun 2003 semasa kepemimpinan Presiden Megawati hingga kini tidak pernah diselesaikan dengan baik, sehingga dapat dikatakan seolah-olah pembahasan RUK tidaklah penting. Bagaimana status keistimewaan Yogyakarta ini diperoleh tidak dihargai untuk menjadi "wisdom" format keistimewaan ke depan.

Sebagai bangsa yang besar, penghargaan terhadap sumbangsih dari entah suatu kelompok masyarakat, komponen masyarakat, daerah, atau pun tokoh mestinya diberi porsi yang lebih memadai, sehingga tidak terjadi seperti saat ini. Pada satu sisi, undang-undang baru yang di dalamnya mengatur jabatan gubernur maksimal 2 periode sudah berlaku sejak tahun 1999, sebagaimana diperkuat UU No 22 tahun 1999 dan UU No 32 tahun 2004. Tetapi, pada sisi lain, status keistimewaan Yogyakarta tidak dituntaskan senyampang dengan keluarnya undang-undang baru tersebut.

Di sini jelas terlihat makna statement Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang ketidakadilan. Jadi sebenarnya beliau protes bahwa seolah-olah sejarah itu menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja. Seharusnya pemerintah pusat jauh-jauh hari sudah secara serius membicarakan

hal ini kepada seluruh stakeholder DIY, tentu saja khususnya mulai dari Sultan, kerabat Keraton, kemudian komponen masyarakat yang lain. Dengan demikian apa yang menjadi format keistimewaan Yogyakarta ke depan menjadi sesuatu yang tidak dipaksakan atau sesuatu yang menjadi tidak komprehensif akibat keterdesakan waktu.

Dari sini lah hendaknya pemerintah pusat maupun seluruh stakeholder di DIY bisa segera mengurai permasalahan ini secara lebih bijak dengan melepas ketersinggungan dan ke-ego-an posisi dalam struktur kenegaraan. Karena sesungguhnya Indonesia di alam kemerdekaan ini memerlukan suatu konsep "satu penting bagi semua, semua penting bagi satu", berdasarkan komitmen yang baik untuk perjalanan NKRI ke depan. Kebijakan ini hendaknya juga mampu menjadi sinergi yang positif di antara seluruh komponen bangsa.

Kesepahaman mengenai "satu penting bagi semua, semua penting bagi satu" mengisyaratkan pula bahwa konsepsi otonomi daerah menuntut perlunya perubahan cara pandang terhadap pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sudah saatnya konsepsi otonomi lebih menekankan konsep kemitraan, ketimbang konsep pemerintah atasan dan pemerintah bawahan. Hubungan antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah mestinya lebih mengarah kepada pola-pola kemitraan.

Untuk seluruh stakeholder DIY, sebagai wong Ngayogyakarta seharusnya kita lebih bijak dengan memahami apa sesungguhnya kehendak Sri

Sultan Hamengku Buwono X yang disampaikan melalui bahasa sanepanya. Kalau kita sendiri tidak mampu menangkap pikiran beliau, maka bagaimana mungkin kita mengharapkan pemerintah pusat akan bisa juga memahami apa yang sesungguhnya kita inginkan bersama. Dari situlah mudah-mudahan kita semua mampu menerjemahkan bentuk keistimewaan Yogyakarta ke depan secara komprehensif dari semua aspek. Apapun keputusan pemerintah pusat, maka kita tetap harus mempunyai komitmen akan memberikan sumbangsih yang terbaik untuk bangsa ini dengan cara merumuskan keistimewaan Yogyakarta jilid II, bertepatan dengan 100 tahun Kebangkitan Nasional.

Apapun nantinya keputusan pemerintah pusat, Sri Sultan Hamengku Buwono X tetap dibutuhkan masyarakat sebagai tokoh panutan, tokoh penggerak spirit, tokoh motivator untuk mengawal Yogyakarta menuju Keistimewaan jilid 2. Kebersaran Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja di hati masyarakat tidak akan larut atau mengecil oleh perubahan tata kenegaraan di NKRI yang berimplikasi kepada tata pemerintahan DIY. Bahkan, marilah carut-marut pembahasan RUK ini kita jadikan momentum penguatan kesadaran bahwa kita memiliki pemimpin spirit, pemimpin jiwa, pemimpin yang benar-benar ada di hati, bukan pemimpin yang hanya ada di atas sepeuk surat keputusan, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Keistimewaan jilid II merupakan sebuah deklarasi komitmen Yogyakarta di bawah kepemimpinan Sri Sultan

Hamengku Buwono X sebagai Raja (sosok panutan) Yogyakarta. Keistimewaan jilid II berisi komitmen-komitmen semua stakeholder di DIY untuk menjadikan Yogyakarta tetap menjadi istimewa dalam prespektif yang luas, mulai dari istimewa di dalam tata pemerintahannya di mana kita mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, kemudian komitmen untuk menuntaskan persoalan kebodohan dan kemiskinan masyarakat dalam jangka waktu tertentu, atau secara lebih luas kita bicarakan pencapaian MDGs (Millenium Development Goals). Melalui Keistimewaan jilid II, kita harus bisa membuat Yogyakarta menjadi yang terbaik dalam semua aspek, termasuk aspek lingkungan, gender, dan aspek-aspek yang lain. Kita tetap menjadikan Yogyakarta sebagai daerah yang multi-kultural penuh toleransi, kedamaian, dan guyub rukun.

Untuk masyarakat DIY, marilah kita berdoa, bermunajat, bila perlu bersama-sama i'tikaf di masjid-masjid untuk memohon kepada Allah Swt kebaikan, memohon hidayahNya, petunjukNya, untuk memberikan takdir yang terbaik bagi masyarakat DIY. Serta memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan lahir dan batin khususnya bagi Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan seluruh masyarakat Yogyakarta untuk menyongsong Keistimewaan Yogyakarta jilid II.

Dirgahayu Sri Sultan Hamengku Buwono X,  
Salam Yogyakarta.  
Salam Indonesia, Jaya! (\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan</li> <li>2. Asisten Perekonomian dan Pemb</li> <li>3.</li> <li>4. Bagian Tata Pemerintahan</li> <li>5. Bagian Hukum</li> <li>6. Bagian Organisasi</li> <li>7. Bagian Perekonomian Pengemb. P</li> <li>8. Bagian Pengendalian Pembanguna</li> <li>9. Bagian Teknologi Informasi dan</li> <li>10. Bagian Humas dan Informasi</li> <li>11. Bagian Umum dan Protokol</li> <li>12. Bagian Umum</li> <li>13. Dinas Bangunan Gedung dan Aset</li> <li>14. Badan Perencanaan Pembangunan</li> <li>15.</li> <li>16. Badan Lingkungan Hidup</li> <li>17. Kantor Kesatuan Bangsa</li> <li>18. Kantor Peng. Taman Pintar</li> </ol>	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 April 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

